

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya ekonomi global, persaingan dalam dunia perekonomian semakin sengit. Hal ini membuat setiap instansi swasta maupun pelayanan publik diharapkan memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang terampil dan memiliki kemampuan yang kuat diberbagai bidang, seperti bidang keuangan, pemasaran, dan operasionalnya, sehingga setiap instansi harus berlomba-lomba meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaannya agar mampu bertahan dalam menghadapi persaingan usaha. Bukan hanya sekedar kuantitas tempat pelayanan saja yang menjadi sorotan masyarakat tetapi kualitas dari pelayanan menjadi prioritas utama yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam pelayanannya (Afnany, 2018). Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik. Organisasi sektor publik yang sering dihubungkan dengan pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang sektor publik adalah rumah sakit (Ikasari et al., 2017).

Dunia medis di dunia global saat ini juga mengalami perkembangan begitu pesat baik dari sisi pelayanan maupun dalam bidang pengobatan. Fasilitas-fasilitas pelayanan kepada masyarakat mengalami perkembangan secara luas. Hal ini sesuai dengan undang-undang No 32 tahun 2009 tentang pemerintah daerah pada Bab IV

pasal 11 ayat 2, menetapkan pada bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota adalah pekerjaan umum, kesehatan, pertanian, pendidikan, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, penanaman modal, pertahanan, lingkungan hidup, koperasi dan terakhir tenaga kerja. Bidang kesehatan berada di posisi kedua setelah bidang pekerjaan umum dari bidang pemerintah yang diwajibkan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota sesuai dengan peraturan tersebut. Artinya, pemerintahan kabupaten dan kota sepenuhnya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya dengan memberikan pelayanan yang memuaskan (Afnany, 2018).

Rumah Sakit merupakan usaha jasa yang memberikan jasa pelayanan sosial di bidang kesehatan. Rumah sakit adalah badan usaha nirlaba (*nonprofit oriented*), meskipun demikian dalam proses usahanya tidak terlepas dari persaingan, sehingga memerlukan suatu organisasi yang kuat dengan sumberdaya pendukung yang berkualitas. Banyaknya rumah sakit yang ada memunculkan persaingan yang dinamis dan kompetitif, sehingga sangat diperlukannya sumberdaya yang inovatif dalam mengembangkan kemampuan individual serta membentuk sebuah organisasi yang kuat dan mempunyai keunggulan daya saing. Keunggulan daya saing yang dapat diciptakan oleh perusahaan dapat dicapai dengan salah satu cara, yaitu suatu sistem informasi yang mampu merangkap, menciptakan dan memanipulasi informasi internal dan eksternal secara efektif dan efisien (Ernawati & Budiyo, 2019).

Rumah Sakit Umum Daerah masih berada pada periode transisi dalam hal pengelolaan keuangan dengan menetapkan pola pengelolaan keuangan Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan amanat UU No 44/2009 tentang Rumah Sakit. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan bagian atau unit kerja dari perangkat daerah dan status hukumnya tidak terpisah dari Pemerintah Daerah. BLUD dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang ditawarkan tanpa mengutamakan keuntungan. Rumah Sakit Umum Daerah perlu diberi kesempatan untuk melakukan pengelolaan secara mandiri sehingga dapat mengembangkan profesionalisme pelayanan tanpa dihambat oleh faktor birokrasi (Ikasari et al., 2017). Rumah sakit yang menerapkan BLU di Kabupaten Badung adalah RSD Mangusada.

Satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU/BLUD diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berupa pengelolaan pendapatan dan biaya, pengelolaan kas, pengelolaan utang, pengelolaan piutang, pengelolaan investasi, pengadaan barang dan/atau jasa, pengelolaan barang, penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengelolaan sisa kas di akhir tahun anggaran dan defisit, kerjasama dengan pihak lain pengelolaan dana secara langsung, dan perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan. Tujuan dari pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan BLU guna meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLU/BLUD. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Pengelolaan keuangan akan berjalan dengan baik dapat diwujudkan jika rumah sakit yang telah berstatus BLU/BLUD memiliki sebuah pengendalian internal yang baik (Afnany, 2018).

Di tengah kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas, rumah sakit sebagai organisasi yang berfungsi melayani masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Sehingga dari publikasi laporan keuangan tersebut dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi dasar pengambilan keputusan (Ernawati & Budiyono, 2019). Maka suatu rumah sakit sebagai usaha sektor publik harus memiliki kualitas laporan keuangan yang baik. Laporan keuangan sebagai dasar guna menafsirkan posisi keuangan entitas dan menilai performa yang sudah lampau dan peluang kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang, laporan keuangan yang buruk dapat menyajikan informasi yang tidak akurat atau tidak tepat mengenai kondisi keuangan rumah sakit. Hal ini dapat mengaburkan gambaran sebenarnya mengenai pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban rumah sakit. Keakuratan informasi keuangan yang rendah menghambat kemampuan manajemen dan pihak berkepentingan untuk membuat keputusan yang informasinya dapat dipercaya (Safitri et al., 2021).

Rumah sakit merupakan salah satu dari sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, karena sifatnya yang kompleks, rumah sakit seringkali menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan mereka (Ernawati & Budiyono, 2019). Sayangnya, beberapa rumah sakit menghadapi masalah serius terkait kecurangan atau fraud dalam laporan keuangannya. Didalam layanan kesehatan di Indonesia, fraud sudah ada sejak lama namun belum dapat dibuktikan, kasus kecurangan meliputi manipulasi angka, pemalsuan dokumen,

atau penyalahgunaan dana. Tingkat kecurangan yang tinggi mengindikasikan adanya masalah serius dalam manajemen keuangan rumah sakit dan dapat merugikan kepentingan pasien serta pihak berkepentingan lainnya. Kecurangan dalam laporan keuangan rumah sakit dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Ini dapat mempengaruhi kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, seperti penurunan ketersediaan peralatan medis, pelayanan yang kurang optimal, atau peningkatan biaya yang tidak masuk akal. Selain itu, pihak berkepentingan seperti investor, kreditor, dan pemerintah juga dapat dirugikan karena informasi keuangan yang tidak akurat, pihak yang berkepentingan akan kesulitan dalam merencanakan kegiatan, mengalokasikan sumber daya, dan mengambil keputusan strategis yang tepat (Fathurrohman & Dewi, 2018).

Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2022) adalah: memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Informasi dikatakan bermanfaat jika “informasi tersebut dapat dipercaya dan digunakan oleh pemakai informasi, serta dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal” (Ernawati & Budiyo, 2019).

(Mulyati et al., 2019) Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, laporan keuangan yang buruk dapat menciptakan kurangnya transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan rumah sakit. Ini dapat memunculkan kecurigaan terhadap rumah sakit dan merusak kepercayaan pihak berkepentingan seperti pasien, masyarakat, atau pemerintah.

Ketidakpercayaan ini dapat menghambat dukungan masyarakat dan investasi di masa depan. Kurangnya kualitas laporan keuangan dapat menyebabkan penyalahgunaan atau penggunaan dana yang tidak efektif di rumah sakit. Tanpa informasi yang memadai mengenai penggunaan dan pengelolaan dana, risiko penyalahgunaan dana atau pemborosan meningkat. Hal ini dapat berdampak negatif pada kemampuan rumah sakit untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan efisien.

Pada RSD Mangusada terjadi tindakan fraud yang merugikan, Kasus ini bergulir ketika RSD Mangusada Badung dalam pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB, dan kendaraan khusus yang sumber dananya dari APBN 2013. Amprahan itu dikirim ke Menteri Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebesar 40.954.098.750. Atas dasar itu, Menteri Kesehatan RI menyetujui Rp 25 miliar untuk RSUD Mangusada Badung. Dan seiring perjalanan proyek tersebut, ada selisih antara realisasi pengeluaran definitif dengan realisasi penerimaan barang yang diterima. Yakni realisasi pengeluaran definitif Rp 19.211.473.636.3 sedangkan realisasi barang yang diterima seharga Rp 12.923.626.782. Jadi ada selisih Rp 6.287.846.854.36. Dan nilai selisih Rp 6.2 miliar inilah yang menjadi temuan yang selanjutnya setelah dihitung oleh BPKP Perwakilan Bali menjadi nilai kerugian keuangan negara (Miasa, 2018).

Laporan keuangan yang berkualitas dari rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Badung ditentukan oleh tingkat pemahaman akuntansi. Tingkat pemahaman akuntansi adalah sejauh mana kemampuan untuk memahami akuntansi baik sebagai seperangkat pengetahuan maupun sebagai proses atau praktik. Dengan adanya kecerdasan atau pengetahuan tentang akuntansi

yang baik dan handal maka, kualitas laporan keuangan suatu perusahaan itu akan lebih bagus dan terhindar dari adanya kesalahan-kesalahan informasi yang dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pemahaman akuntansi itu sendiri (Mulyati et al., 2019). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hanifah et al., 2020; Indrawan & Dewi, 2022; Lestari & Dewi, 2020; Pramesti et al., 2021) menyatakan bahwa tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari (Miliani et al., 2022; Pratiwi et al., 2021) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan (Ernawati & Budiyono, 2019). Penggunaan teknologi informasi akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan BLU/BLD karena, sistem akuntansi perlu memanfaatkan semua jenis informasi dan teknologi komputer agar efektif dan efisien penyusunan laporan keuangannya tercapai sesuai dengan standart yang ditentukan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna laporan keuangan ditinjau dari kualitas, kecepatan dan keakuratan data yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut (Afnany, 2018). Pada penelitian (Ernawati & Budiyono, 2019) penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh

(Hanifah et al., 2020) (Afnany, 2018) menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain itu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pengendalian internal. Pengendalian internal berfungsi untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang terdapat dalam sebuah organisasi dalam hal ini adalah rumah sakit (Permatasari et al., 2021). Pengendalian intern dalam instansi lemah, maka kemungkinan besar dapat terjadi banyak kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dan akan menimbulkan risiko yang sangat besar pula. Artinya, kualitas daripada laporan keuangan menjadi tidak valid atau tidak kompeten (Afnany, 2018). Pada penelitian yang dilakukan oleh (Ikasari et al., 2017; Lestari & Dewi, 2020; Permatasari et al., 2021) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga ketika pelaksanaan pengendalian intern semakin baik akan mengoptimalkan kualitas laporan keuangan, namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Ernawati & Budiyo, 2019; Pramesti et al., 2021; Safitri et al., 2021) menyatakan bahwa pengendalian internal tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Badung harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan, sehingga mampu untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia rumah sakit dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian

laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Ikasari et al., 2017). Kualitas sumber daya manusia dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ikasari et al., 2017; Irafah & Sari, 2020) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat sumber daya manusianya maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari (Ernawati & Budiyono, 2019) yang mana pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik (Sukriani et al., 2019). Setiap orang yang memiliki pengalaman yang luas akan lebih mudah berinteraksi dalam melaksanakan pekerjaannya baik di organisasi, perusahaan, maupun juga di pemerintahan. Dengan demikian orang-orang yang berpengalaman mempunyai peluang yang lebih besar untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas dibandingkan dengan orang yang belum berpengalaman (Sukriani et al., 2019). Pada penelitian yang dilakukan oleh (Arum & Nuraini, 2021; Sukriani et al., 2019) menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun hal tersebut menjadi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Budiono et al., 2018) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Bersarkan fenomena dan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi, Penggunaan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan RSD Mangusada”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu:

1. Apakah tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan RSD Mangusada?
2. Apakah penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan RSD Mangusada?
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan RSD Mangusada?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan RSD Mangusada?
5. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan RSD Mangusada?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan RSD Mangusada
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan RSD Mangusada
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan RSD Mangusada
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan RSD Mangusada
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas laporan keuangan RSD Mangusada

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, peneliti berharap dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, didarapkan dapat digunakan menjadi referensi atau rekomendasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang sangat tertarik pada bidang akuntansi sektor publik (ASP) khususnya pada Kementrian atau Lembaga BLU/BLUD yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat mempraktekkan teori yang selama ini di dapat dalam mengikuti jenjang pendidikan dengan keadaan dan permasalahan yang ada di lapangan serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

2) Bagi Perusahaan atau Rumah Sakit

Hasil daripada penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Badung, karyawan RSD Mangusada sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk mengetahui arti penting sumber daya manusia, teknologi informasi, pengendalian internal dan pengalaman kerja sehingga dapat mendorong kualitas laporan keuangan pada RSD Mangusada.

3) Bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar

Hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai tambahan referensi di perpustakaan bagi mahasiswa dan mahasiswi yang nantinya digunakan sebagai acuan atau pertimbangan untuk penelitian yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Stewardship Theory*

Stewardship theory sebagaimana dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991), menjelaskan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh goals individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil untuk kepentingan instansi. Pada masa perkembangan akuntansi, pendekatan *stewardship* telah dipakai sebagai suatu pendekatan untuk menentukan titik berat utama dari suatu laporan keuangan, yang didasarkan kepada suatu konsep bahwa manajemen pada suatu perusahaan dianggap bertanggungjawab kepada pemilik untuk mengamankan kekayaan yang telah dipercayakan kepadanya. Pemilik bertindak sebagai prinsipal dan manajemen sebagai *steward*. Pendekatan ini berasal dari ilmu psikologi dan sosiologi yang didisain oleh para peneliti untuk membentuk suatu perilaku yang mengarah pada sikap melayani (*stewardship*).

Stewardship theory sangat berhubungan dengan konsep-konsep yang mencakup tentang model of man, behavioral, mekanisme psikologis (motivasi, identifikasi dan kekuasaan), dan mekanisme situasional yang mencakup manajemen dan perbedaan kultur (Afnany, 2018). *Stewardship theory* dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenai hakekat sifat-sifat manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dan bertanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran untuk kepentingan publik dan stakeholder. Konsep teori ini didasarkan pada asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen

dicerminkan sebagai *good steward* yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya secara penuh tanggungjawab. *Stewardship theory* menekankan pada adanya hubungan yang kuat dalam mencapai sebuah tujuan organisasi (Afnany, 2018).

Kondisi perkembangan organisasi sektor publik semakin lengkap dengan bertambahnya tuntutan akan pertanggungjawaban pada organisasi sektor publik, sehingga *principal* semakin sulit dalam melaksanakan sendiri fungsi-fungsi dari pengelolaan. Model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik *stewardship theory* misalnya, adanya berbagai keterbatasan menyebabkan pemilik sumber daya (*capital supplier/principal*) mempercayakan (*trust* amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward-manajemen*) yang lebih capable dan siap. Kontrak hubungan antara *stewards* dan *principals* atas dasar kepercayaan (*amanah-trust*), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi (Afnany, 2018).

Asumsi-asumsi dasar *teori stewardship* tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Manajemen sebagai *stewards* (pelayan/penerima amanah/pengelola), akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi.
- (2) Pendekatan *governance* menggunakan sosiologi dan psikologi, untuk menguji situasi manajemen sebagai *stewards* (pelayan) dapat termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan *principal*
- (3) Model Manusia, *steward* (pelayan) berperilaku kolektif untuk kepentingan organisasi.
- (4) Motivasi pimpinan sejalan dengan tujuan *principal* sehingga *steward* (manajemen) bertindak sesuai keinginan *principal*.
- (5) Kepentingan manajer-*principal* adalah konvergensi yang artinya keduanya mempunyai tujuan yang sama menuju satu titik yaitu untuk kepentingan organisasi.
- (6) Struktur berupa fasilitasi dan pemberdayaan,
- (7) Sikap pemilik

mempertimbangkan risiko, (8) Hubungan principals manajemen saling percaya. (Afnany, 2018)

Stewardship theory dalam penelitian ini dapat memandang bahwa manajemen organisasi sebagai *stewards* atau pelayanan. Manajemen sebagai *stewards*, penerima amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan (Permatasari et al., 2021).

2.1.2 Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* dikenalkan pertama kali oleh Freeman (1983), dimana yang menjadi latar belakang dari pendekatan teori ini adalah keinginan untuk membangun suatu *framework* yang bersifat responsif terhadap permasalahan yang dihadapi para manajer saat itu, di mana *stakeholder* sebagai setiap kelompok atau individu yang dapat dipengaruhi oleh pencapaian organisasi. Teori *stakeholder* menerangkan bagaimana entitas perusahaan memenuhi harapan pihak *stakeholder*. Pihak *stakeholder* memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi mengenai kondisi atau kinerja entitas perusahaan, di mana informasi tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan. (Aries & Suhartono, 2021)

Berdasarkan karakteristiknya *stakeholder* ada 2 macam, 1) *stakeholder primer* dan 2) *stakeholder skunder*. *Stakeholder primer* merupakan pihak-pihak individu atau kelompok yang paling berpengaruh langsung dalam perusahaan, seperti investor, pemegang saham, karyawan, pemasok, pelanggan, dan pemerintah. Sedangkan *stakeholder* sekunder yaitu pihak-pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan tetapi tidak terkait dengan transaksi perusahaan dan tidak begitu esensial keberadaannya (Aries & Suhartono, 2021).

(Hayadi & Rosini, 2019) Teori *stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholder-nya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* perusahaan tersebut. Teori *stakeholder* berkaitan erat dengan penelitian kualitas laporan keuangan rumah sakit karena melibatkan pemahaman tentang siapa saja pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam laporan keuangan rumah sakit. Dalam konteks ini, *stakeholder* adalah setiap individu, kelompok, atau entitas yang memiliki kepentingan atau terpengaruh oleh kinerja keuangan rumah sakit dan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.

Teori *stakeholder* menekankan bahwa organisasi, seperti rumah sakit, harus mempertimbangkan dan memahami kepentingan berbagai pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan organisasi tersebut. Pihak-pihak ini dikenal sebagai *stakeholder*, dan mereka dapat memiliki kepentingan yang berbeda-beda terhadap kinerja keuangan rumah sakit. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan harus memenuhi harapan dan kebutuhan dari berbagai *stakeholder* tersebut. Semakin baik kualitas laporan keuangan yang disajikan, semakin baik pula hubungan kedua belah pihak tersebut, karena meningkatnya rasa kepercayaan *stakeholder* pada entitas perusahaan (Aries & Suhartono, 2021).

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.3.1 Laporan Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1 tahun 2022 memaparkan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Pada umumnya laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Pada akhir usaha, setiap lembaga atau perusahaan harus menyusun laporan keuangan yang selanjutnya dilaporkan kepada pihak ke-3 atau pihak yang berkementingan. Laporan keuangan memiliki peranan penting karena laporan keuangan dibuat dengan maksud dan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, serta laporan kemajuan yang secara periodik dilaporkan yang mana informasi keuangan tersebut sangat bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Lebih rinci dijelaskan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah: (1) memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini, (2) memberikan informasi terkait jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini, (3) memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu, (4) memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan, (5) memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu, (6) memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode,

dan (7) memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan (Afnany, 2018).

Manfaat laporan keuangan menurut (Ernawati & Budiyo, 2019) menjelaskan bahwa adanya laporan keuangan yang disediakan oleh pihak manajemen maka sangat membantu pihak ketiga dalam pengambilan keputusan, dan sangat berguna dalam melihat kondisi atau prediksi masa yang akan datang dan juga sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam proses pengambilan keputusan demi kemajuan perusahaan dimasa yang akan datang.

2.1.3.2 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan merupakan persyaratan sesuai dengan aturan yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan (Afnany, 2018). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 35 tahun 2021 memaparkan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: Relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

1) Relevan.

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi

masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya

tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.4 Tingkat Pemahaman Akuntansi

Menurut Mahmudi (2010:124) Pemahaman akuntansi adalah sejauh mana kemampuan untuk memahami atau mengerti benar akuntansi baik sebagai seperangkat pengetahuan (*body of knowledge*) maupun sebagai proses, mulai dari pencatatan transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Dari definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa pemahaman akuntansi merupakan sejauh mana seseorang mengerti dan paham betul akan akuntansi, yang mana seseorang paham akuntansi mulai dari proses mencatat transaksi keuangan, pengelompokkan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan (Taufiqurrohman et al., 2021).

2.1.5 Penggunaan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan (Ernawati & Budiyo, 2019).

Teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi itulah yang disebut dengan teknologi informasi. Komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi merupakan rangkaian dari teknologi informasi. Selain sebagai teknologi komputer (*hardware dan software*) teknologi informasi juga termasuk untuk pemrosesan dan penyimpanan segala macam informasi, juga teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. (Afnany, 2018)

Menurut Aldiani (2020) laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pemberi sarana penyusun laporan keuangan dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu: (1) Perangkat keras (*hardware*) adalah perangkat yang berwujud fisik dan kasat mata. (2) Perangkat lunak (*software*) meliputi perintah-perintah yang berisi program dan data yang melengkapi dan memiliki tugas yang menghubungkan manusia dengan perangkat kerasnya.

Penggunaan teknologi informasi ini penting karena sangat mempermudah mempercepat proses pengelolaan data transaksi keuangan, penyajian laporan keuangan, serta dapat menghindari kesalahan dalam melakukan posting dari dokumen buku, jurnal, buku besar, hingga menjadi kesatuan laporan keuangan yang utuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan tersedianya teknologi informasi yang terus berkembang diharapkan akan membantu dalam proses pembuatan dan penyusunan pelaporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu (Ernawati & Budiyono, 2019)

2.1.6 Pengendalian Internal

Pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang agar manajemen mendapat keyakinan yang memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarnya. Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan untuk dewan komisaris, management dan personel lain yang digunakan untuk memberikan suatu keyakinan yang memadai mengenai efektifitas dan efisiensi operasi, serta keandalan pelaporan keuangan. Penerapan pengendalian yang layak dapat memberikan kepercayaan yang tinggi atas kualitas laporan keuangan dan dapat meningkatkan kecercayaan *stakeholder*/pemegang saham (Safitri et al., 2021).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) No. 60 tahun 2008 memaparkan Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pengendalian intern terdiri dari lima komponen yaitu: (1) Lingkungan pengendalian, (2) Penilaian risiko, (3) Kegiatan pengendalian, (4) Informasi dan komunikasi dan (5) Pemantauan pengendalian intern.

2.1.6.1 Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait (SPIP No. 60 tahun 2008).

2.1.6.2 Penilaian Risiko

Risiko adalah sesuatu yang berkaitan dengan suatu hambatan dalam pencapaian tujuan dan kemungkinan terjadinya sesuatu yang dapat mengakibatkan kerugian. Sehingga penilaian risiko memiliki arti kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang dapat mengancam dalam pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi (Afnany, 2018).

SPIP No. 60 tahun 2008 menyatakan bahwa pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2.1.6.3 Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut: Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah, kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko, kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah, kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis, prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis dan kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan (SPIP No. 60 tahun 2008).

2.1.6.4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus (SPIP No. 60 tahun 2008).

2.1.6.5 Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian adalah proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian internal dari waktu ke waktu. Untuk memberikan keyakinan memadai

bahwa tujuan entitas akan tercapai, manajemen harus memantau pengendalian untuk menentukan apakah mereka beroperasi secara efektif (Afnany, 2018). SPIP No. 60 tahun 2008 memaparkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern, pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

2.1.7 Kualitas Sumber Daya Manusia

Instansi yang berhasil adalah yang mampu melihat sumber daya manusia sebagai aset yang harus dikelola sesuai dengan kebutuhan. Peran fungsi SDM harus memastikan: (1) Pemberdayaan SDM menjadi bagian utama dalam pengelolaan SDM, (2) Terpenuhinya SDM yang memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan, (3) Proses SDM telah berjalan dengan baik, wajar, dan objektif, (4) Menjadikan kepuasan kerja karyawan sebagai bagian dari keberhasilan instansi, dan (5) Sederet permasalahan yang berhubungan dengan. (Afnany, 2018)

Spencer dan Spencer (1993:9) menyatakan bahwa kompetensi adalah "*an underlying characteristic of an individual that is casually related to criterion-referenced effective and/or superior performance in a job or situation*". (yang memiliki arti karakteristik dasar yang dapat memengaruhi cara berpikir dan bertindak seseorang, membuat generalisasi terhadap segala situasi yang dihadapi, serta bertahan cukup lama dalam diri, manusia). (Afnany, 2018) berdasarkan dari definisi ini, maka beberapa makna yang terkandung dalamnya adalah sebagai berikut:

a) Karakteristik dasar (*underlying characteristic*)

Bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang serta mempunyai perilaku yang mendalam dan melekat dan dapat memprediksi berbagai keadaan tugas pekerjaan adalah sebutan dari kompetensi.

b) Hubungan Kausal (*causally related*)

Kompetensi menyebabkan atau digunakan dalam memprediksikan kinerja seseorang, artinya jika seseorang mempunyai kompetensi yang tinggi, maka akan mempunyai kinerja yang tinggi pula.

c) Kriteria (*criteria referenced*)

Kompetensi akan memprediksikan seseorang dapat bekerja dengan baik, kompetensi tersebut harus terukur dan spesifik atau terstandar.

(Irafah & Nurmala Sari, 2020) mendefinisikan kompetensi jika dalam akuntansi disebut sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan bagi seseorang dalam bekerja sebagai seorang akuntan. Kegagalan sumber daya manusia rumah sakit dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak negatif pada kekeliruan laporan keuangan yang telah dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan memahami dengan baik logika akuntansi.

2.1.8 Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja merupakan peristiwa yang pernah dilakukan oleh individu dalam menjalani kehidupannya khususnya dalam mencari nafkah. Seorang

karyawan rumah sakit harus mempunyai pengalaman kerja yang cukup tentang tugas dan tanggung jawabnya. Semakin banyak pengalaman karyawan dalam bidangnya akan semakin banyak pula hasil dari pekerjaannya. Pengalaman merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individual selain kepribadian. Pengalaman kerja dapat dibedakan menjadi tiga antara lain: pengalaman kerja dalam bidangnya, pengalaman kerja dalam memperoleh informasi pekerjaannya, dan pengalaman kerja dalam kompleksitas tugas yang dikerjakan (Afnany, 2018).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

(Miliani et al., 2022) dalam penelitiannya yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan lembaga perkreditan desa di kabupaten Gianyar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai LPD di Kabupaten Gianyar yang berjumlah 1.670 orang. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling diperoleh 384 responden. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan profesionalisme, penerapan sistem informasi akuntansi (SIA), dan peran pengawas internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

(Indrawan & Dewi, 2022) pada penelitian sebelumnya yang berjudul Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BUMDES Se-Kabupaten Jemberana. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif

dengan menggunakan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner via google form. Adapun populasi yang digunakan adalah seluruh BUMDes se-Kabupaten Jembrana. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria responden adalah ketua BUMDes, bendahara BUMDes dan pengawas BUMDes dan didapat sebanyak 123 responden dari total 41 BUMDes. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, pengukuran variabel, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

(Safitri et al., 2021) dalam penelitian sebelumnya yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Tata Kelola Perusahaan, Dan Kualitas Laporan Keuangan. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai yang ada pada RSUD Benda Pekalongan dan sampel penelitian ini sebanyak 90 orang responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan GCG secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, artinya jika tata kelola perusahaan meningkat maka kualitas laporan keuangan juga akan meningkat.

(Sari & Indriyani, 2021) pada penelitiannya yang berjudul Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Rumah Sakit Pertamina. Penelitian ini menggunakan data primer dan pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini digunakan tiga variabel bebas

dan satu variabel terikat, ketiga variabel bebas tersebut adalah Sumber Daya Manusia (X1), Teknologi Informasi (2) dan Sistem Pengendalian Intern (X3) sedangkan variabel terikatnya adalah Kualitas Laporan Keuangan (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

(Pramesti et al., 2021) pada penelitiannya yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner langsung kepada accounting atau karyawan yang bekerja sebagai pembuat laporan keuangan sebanyak 60 kuesioner. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sistem informasi akuntansi, tingkat pemahaman akuntansi, dan good corporate governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

(Permatasari et al., 2021) pada penelitian sebelumnya yang berjudul Pengaruh Efektivitas Audit Operasional, Pengendalian Internal Dan Profesionalisme Aparatur Pengelola Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Rumah Sakit. Responden penelitian ini adalah petugas pengelola keuangan RSUD Bengkulu. Untuk memperoleh data digunakan teknik penelitian lapangan dengan dokumentasi yaitu mengumpulkan data sekunder seperti buku, literatur, leaflet dan arsip yang berkaitan dengan objek penelitian, wawancara untuk memperkuat argumentasi penulis dan menyebarkan kuesioner, Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa efektivitas audit operasional, pengendalian internal dan profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan rumah sakit.

(Sari & Sujana, 2021) pada penelitiannya mengenai pengaruh profesionalisme, kompetensi, dan pengalaman kerja terhadap kualitas laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Sawan. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di Badan Usaha Milik Desa se-Kecamatan Sawan sejumlah 137 orang, teknik sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 39 responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda yang diolah dengan bantuan program SPSS 20 for windows. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, (2) kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan (3) pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

(Arum & Nuraini, 2021) meneliti mengenai Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Kompetensi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM Di Kota Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang bersumber dari kuesioner dan diukur dengan Skala Likert. Populasi dalam penelitian ini adalah 50 responden yang diambil dari UKM yang ada di kota Bogor. UMKM yang dijadikan sebagai data adalah UMKM yang mencatat laporan keuangan dalam usahanya. Data yang digunakan adalah data primer. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan program SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel yang diuji yaitu tingkat

pendidikan, pengalaman kerja, dan kompetensi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kota Bogor.

(Hanifah et al., 2020) pada penelitian sebelumnya yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan start-up berbasis teknologi di Jakarta. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 32 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan, pengetahuan akuntansi, dan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

(Irafah & Nurmala Sari, 2020) pada penelitian sebelumnya yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Objek penelitian ini adalah seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-sumatera utara. Sampel pada penelitian ini adalah 34 (tiga puluh empat). Pengumpulan data dilakukan dengan cara metode kuesioner, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan. Peran Internal Audit berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan secara parsial. Kesuksesan penerapan SIKD tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan secara parsial Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, Kesuksesan penerapan SIKD berpengaruh secara simultan terhadap kualitas Laporan Keuangan.

(Lestari & Dewi, 2020) pada penelitian sebelumnya yang berjudul Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling yaitu purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 60 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

(Ernawati & Budiyono, 2019) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Tehnologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Di Kabupaten Blora. Populasi dalam penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum di Kabupaten Blora yang melaksanakan kegiatannya pada bidang akuntansi/penatausahaan keuangan. Sampel di dalam penelitian ini adalah karyawan bagian akuntansi dan keuangan, adapun jumlah kuesioner yang diolah dalam penelitian ini sebanyak 47 buah kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

(Rizqi & Apriyanto, 2019) pada penlitiannya yang berjudul Pengaruh Kompetensi Manajer Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Kepanjen). Menggunakan sampel sebanyak 45 orang pada bagian pengelola keuangan pada 11 koperasi simpan pinjam di Kabupaten

Kepanjen. Hasil penelitian dengan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa kompetensi manajer keuangan, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Masing-masing variabel menunjukkan bahwa kompetensi manajer keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

(Suryaningsih, 2019) pada penelitiannya yang meneliti mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan menjadikan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, serta kualitas laporan keuangan di rumah sakit cipto mangunkusumo, rumah sakit ini berlokasi di Jl. Diponegoro No.71 Jakarta Pusat sebagai objek penelitian. Dengan hasil penelitian kompetensi SDM dan pengendalian internal berpengaruh pada kualitas laporan keuangan Rumah Sakit Dr.Cipto Mangunkusumo.

(Mulyati et al., 2019) meneliti mengenai pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan terhadap salah satu organisasi sektor publik, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Ciamis. Untuk menguji hipotesis menggunakan model regresi linier sederhana untuk mengetahui bagaimana pengaruh variable yang diteliti, dimana data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada 30 orang yang merupakan bagian akuntansi dan auditor di RSUD sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan memiliki hubungan yang kuat dengan arah yang positif. Sementara itu

hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan sebesar 41,6% terhadap kualitas laporan keuangan.

